



**BANGKA  
2023**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2026**



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Dalam RENSTRA ini juga memuat sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan masing masing indikator output sebagai upaya untuk Menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan

Semoga Penyusunan Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan organisasi lebih lanjut dan kami berharap Dinas Kesehatan semakin nyata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan khususnya untuk peningkatan angka usia harapan hidup dan derajat kesehatan Kota Pekanbaru. Kepada semua Pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini kami mengucapkan terima kasih.

Sungailiat, April 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKA**



*dr. Then Suyanti*  
**dr. Then Suyanti, MM**  
**NIP. 19770919 200501 2 01**

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (health in all policies).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan

penyakit dan pengutamakan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun dan bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dalam proses penyusunan renstra Dinas Kesehatan dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan melalui tahap persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 22 seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 91);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22)

30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah
  - 4.1.a Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan PD Kabupaten Tahun 2024-2026
  - 4.1.b Norma, Standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai kewenangan Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Melalui (IKU) PD
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 Melalui IKK

Bab VIII : Penutup

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan keputusan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2021, tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

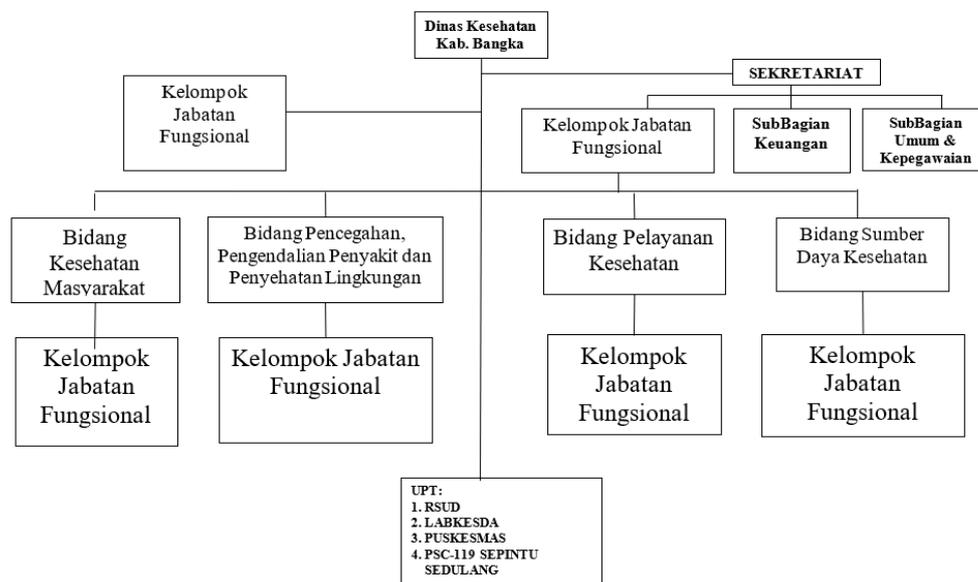
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahi:
  1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat yang membawahi:
  1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga;

2. Sub Koordinator Gizi; dan
  3. Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Kesehatan Kerja Dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang membawahi:
- a. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan;
  - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular, Surveilans dan Imunisasi; dan
  - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular, Matra dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan yang membawahi:
1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. Sub Koordinator Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan yang membawahi:
1. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
  3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas Kesehatan:**

**a. Tugas pokok**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

**b. Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Kesehatan;
- 2) Penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 3) Pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Kesehatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan pelayanan kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang pelayanan Kesehatan;
- 7) Penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang kesehatan sesuai dengan Kewenangan;
- 9) Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
- 10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; dan
- 11) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris**

### **a. Tugas pokok**

- 1) mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- 2) melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasma, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- 3) melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- 4) mengkoordinasi dan penyusunan produk hukum di bidang Kesehatan di daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- 6) mengkoordinasi dan pengelolaan data dan informasi Kesehatan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- 7) menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 8) mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- 9) mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah (BMD);
- 10) mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- 11) mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- 12) mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi

- dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Kesehatan;
- 13) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
  - 14) mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPK);
  - 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada Dinas Kesehatan.

**b. Fungsi**

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kesehatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 3) penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan;
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 5) penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 6) pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang kesehatan;
- 7) penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 8) penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- 10) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekretariat membawahi 3 (Tiga) sub bagian.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Mempunyai tugas :**

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- 3) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- 4) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 5) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- 7) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- 8) Mengendalikan arsip aktif;
- 9) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- 10) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- 11) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan

14) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Keuangan**

**Mempunyai tugas :**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- 3) menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- 7) menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- 8) melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- 9) menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- 10) mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan**

**Mempunyai Tugas**

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
- 3) menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 4) mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas kesehatan ;
- 5) melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas kesehatan;
- 6) menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- 7) menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kegiatan pada Dinas kesehatan;
- 8) melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- 9) menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan Semesteran dan Tahunan Dinas;
- 10) menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LPPD/LKPJ Dinas;
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 12) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **3. Bidang Kesehatan Masyarakat**

#### **a. Tugas**

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga.

#### **b. Fungsi**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

#### **- Sub Koordinator Kesehatan Keluarga**

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan kesehatan keluarga, meliputi : Kesehatan Ibu,

Kesehatan Anak, Kesehatan Remaja, Kesehatan Lansia dan Pelayanan Keluarga Berencana;

- 2) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga;
- 3) melaksanakan kegiatan kesehatan keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kesehatan keluarga;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan kesehatan keluarga;
- 6) monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan keluarga;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan kesehatan keluarga;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Koordinator Gizi**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan gizi, meliputi : gizi keluarga di setiap siklus kehidupan, gizi masyarakat yaitu masalah kekurangan gizi, anemia, gangguan akibat kekurangan iodium, kurang vitamin A dan gizi lebih serta gizi di institusi sesuai kewenangan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan gizi;
- 3) Melaksanakan kegiatan perbaikan gizi;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan gizi;
- 5) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan gizi;
- 7) Monitoring dan evaluasi kegiatan gizi;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan gizi;

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 3) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

##### **a. Tugas**

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa.

##### **b. Fungsi**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa; dan

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- **Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan penyehatan lingkungan, meliputi: penyehatan air, sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, hygiene sanitasi pangan dan pengamanan limbah, udara dan radiasi;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan;
- 3) Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penyehatan lingkungan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyehatan lingkungan;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan penyehatan lingkungan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;

- 3) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Matra dan Kesehatan Jiwa**

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, kinerja dan anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
3. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
4. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;
6. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pelayanan Kesehatan**

### **a. Tugas**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

### **b. Fungsi**

- 1) Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 2) Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi program pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

- 7) Pelaksanaan evaluasi program pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- **Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional**

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan dan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman teknis dan standar pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan primer dan tradisional yang dilakukan pemerintah maupun swasta;
- 4) Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan primer dan tradisional;
- 5) Melaksanakan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi, pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat tentang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan**

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten;
- 3) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;

- 4) Menyiapkan bahan pertimbangan rekomendasi perijinan rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjangnya;
- 5) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Koordinator Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan dan kebijakan teknis operasional upaya peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 2) Menyiapkan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi tingkat kabupaten;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi standar pelayanan dan pengelolaan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi tingkat kabupaten;
- 4) Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan kebijakan, peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 5) Melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu, standarisasi dan akreditasi;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

### **a) Tugas**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan..

### **b) Fungsi**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

#### **- Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta alat kesehatan;

- 4) Melaksanakan pengendalian penyediaan obat, penggunaan obat generik dan perbekalan kesehatan bagi puskesmas dan jaringannya;
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan lainnya;
- 6) Melaksanakan pengambilan sampel/ccontoh sediaan farmasi, makanan dan minuman di lapangan dan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan pengelolaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada sarana pelayanan kefarmasian;
- 8) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan;
- 9) Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta alat kesehatan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan verifikasi atas aplikasi aspak yang telah dilakukan oleh UPT;
- 5) Memberikan rekomendasi registrasi dan perizinan sarana kesehatan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- 7) Monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana kesehatan;

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, prosedur tetap, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi: pelatihan, pembinaan, pemantauan serta mengimplementasikan analisis kebutuhan pelatihan;
- 4) Memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia kesehatan yang berprestasi di bidang kesehatan;
- 5) Memberikan rekomendasi registrasi dan perizinan tenaga kesehatan;
- 6) Menyiapkan dan menyusun laporan sumber daya manusia kesehatan termasuk laporan aplikasi sdmk;
- 7) Monitoring dan evaluasi program sumber daya manusia kesehatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7. UPTD**

### **a) Tugas**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

### **b) Fungsi**

UPTD mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi teknis operasional dan fungsional.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan pegawai Dinas Kesehatan yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Pangkat/Golongan Pegawai**  
**pada Dinas Kesehatan**

PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SD	2				2
SLTP		1			1
SLTA		17	22		39
D1			11		11
D2					0
D3		96	279		375
DIV/S1		1	145	15	161
S2			23	29	52
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>115</b>	<b>480</b>	<b>44</b>	<b>641</b>

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka**

No.	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Gedung Kantor	461	433	28	0
2	Kendaraan Roda 4	62	59	3	0
3	Kendaraan Roda 2	194	185	5	4
4	Kendaraan Roda 3	0	0	0	0
5	Personal Komputer (PC)	406	403	2	1
6	Notebook/Laptop	147	143	4	0
7	Kamera	7	7	0	0
8	Printer	398	396	1	1
9	LCD Proyektor	24	24	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1699</b>	<b>1650</b>	<b>43</b>	<b>6</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka masing-masing Sekretariat/Bidang Tahun 2023**

No	Sekretariat/Bidang	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas + Sekretaris + Kepala Bidang	6
2	Sekretariat	59
3	Bidang P2PL	26
4	Bidang Kesehatan Masyarakat	17
5	Bidang Sumber Daya Kesehatan	22
6	Bidang Pelayanan Kesehatan	18

**Tabel 2.4**  
**Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Jenis Tenaga	2022	
		Jumlah	Rasio
1	Dokter Spesialis	106	
2	Dokter Umum	145	
3	Dokter Gigi	33	
4	Perawat	993	
5	Perawat Gigi	39	
6	Bidan	334	
7	Farmasi (Apoteker & Asisten Apoteker)	134	
8	Gizi	61	
9	Sanitarian	31	
10	Kesmas	59	
11	Nakes lainnya	124	
12	Analisis	99	
13	Tenaga Umum	750	

**Tabel 2.5**  
**Data Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Menurut Pendidikan Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	66
2	S1/DIV	522
3	DIII	859
4	DII	0
5	DI	11
6	SLTA	328
7	SLTP	15
8	SD	7
	<b>Jumlah</b>	<b>1808</b>

**Tabel 2.6**  
**Data Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Menurut Golongan**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
<b>1</b>	Golongan IV	44
<b>2</b>	Golongan III	480
<b>3</b>	Golongan II	115
<b>4</b>	Golongan I	2
<b>5</b>	Kontrak	1167
	<b>Jumlah</b>	<b>1808</b>

**Tabel 2.7**  
**Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Puskesmas				Jumlah Rumah Sakit				Unit Pelayanan Kesehatan		Jumlah Posyandu					Hotel		Sarana Air Minum	Jumlah Penyelenggara Sarana Air Minum
		Pera watan	Non Ra wat Inap	Kelil ing	Pustu	RS Khus us Peme rintah	RS Khus us Swast a	RS Umum Peme rintah	RS Umum Swasta	Swast a	Peme rintah	Prata ma	Mady a	Purnam a	Mandiri	Jumlah	Binta ng	Non Bintang		
1	Mendo Barat	Petali ng		2	4							10	0	0	10	20	1	0	7770	21
2		Pena gan		2	2								12	2	0	0	14	0	0	1481
3	Meraw ang		Bat urus a	1	2			RSUP Kep.Ba bel		1		4	0	13	5	23	0	1	4779	21
4	Puding Besar	Pudin g Besar		1	4			RSUD Sjafr ie Rachm an				0	0	0	16	16	0	0	1963	11
5	Sungail iat		Sun gaili at	1	1					9	1	0	9	0	8	17	1	4	1960	22
6			Ken ang a	1	3	RSJ Prov. Kep Babel		RSUD Depati Bahrin	RS Medika Stania, RS Arsani	2		6	6	0	8	20	1	9	4453	34
7			Sin ar Bar u	1	2							5	6	0	2	13	1	0	1650	9
8	Pemali		Pe mali	1	2						1	0	0	5	15	20	0	0	4430	36
9	Bakam	Baka m		2	4					1		0	0	0	22	22	0	0	1481	13
10	Belinyu	Beliny u		2	4			RSUD DR.Eko Maulan a Ali		2		0	0	0	18	18	2	4	6998	41
11			Gun ung Mud a	1	1							0	0	8	18	26	0	0	2286	6
12	Riau Silip			2	6					1		0	0	17	9	26	0	0	5231	12
				17	35	1 RS	0 RS	4 RS		16	2	37	36	30	131	235	6	18	4442	229

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

**Tabel TC.2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinkes**  
**Kabupaten Bangka**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2,019	2,020	2,019	2,020	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	172,315,430,000	165,834,730,000	149,641,454,600	154,358,810,600	87	93	- 6,480,700,000	4,717,356,000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15,630,000,000		15,158,510,000		97	0	- 15,630,000,000	- 15,158,510,000	
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	980,000,000		980,000,000		100	0	- 980,000,000	- 980,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,500,000,000	1,500,000,000	1,499,865,000	1,499,580,000	100	100	-	- 285,000	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH	1,000,000,000		980,000,000		98	0	- 1,000,000,000	- 980,000,000	
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	288,884,057,300	1,327,284,078,900	288,808,998,700	1,322,110,738,700	100	100	1,038,400,021,600	1,033,301,740,000	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan
	2,019	2,020	2,019	2,020	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,828,366,540,000	1,553,302,438,700	1,663,830,387,465	1,418,075,979,900	91	91	- 275,064,101,300	- 245,754,407,565
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	3,318,700,000	23,778,100,000	3,311,010,000	21,349,400,000	100	90	20,459,400,000	18,038,390,000
PROGRAM PENGAMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	2,794,000,000	570,000,000	2,777,500,000	570,000,000	99	100	- 2,224,000,000	- 2,207,500,000
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13,182,800,000	84,216,500,000	12,644,865,000	82,016,747,000	96	97	71,033,700,000	69,371,882,000
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	122,727,300,000	128,013,500,000	113,540,185,400	125,951,715,000	93	98	5,286,200,000	12,411,529,600
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	185,219,500,000	14,816,181,100	182,020,870,500	14,074,085,100	98	95	- 170,403,318,900	- 167,946,785,400
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	193,914,040,000	242,915,404,700	189,147,129,800	240,169,078,700	98	99	49,001,364,700	51,021,948,900
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	4,089,000,000	644,797,340,000	4,089,000,000	582,010,701,200	100	90	640,708,340,000	577,921,701,200
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK	5,145,500,000	1,802,200,000	4,220,196,000	1,714,875,000	82	95	- 3,343,300,000	- 2,505,321,000

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan
	2,019	2,020	2,019	2,020	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
BALITA								
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	13,082,100,000	6,012,500,000	11,272,125,000	5,959,821,600	86	99	- 7,069,600,000	- 5,312,303,400
PROGRAM KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT	681,674,567,600	2,194,952,884,200	608,694,448,043	1,944,292,256,390	89	89	1,513,278,316,600	1,335,597,808,347
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1,191,896,380,000	7,259,778,127,400	1,165,339,413,600	6,777,219,888,799	98	93	6,067,881,747,400	5,611,880,475,199
PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	1,915,853,114,500	3,160,687,579,000	1,669,548,725,400	2,836,379,317,409	87	90	1,244,834,464,500	1,166,830,592,009
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	147,649,900,000		115,958,036,700		79	0	- 147,649,900,000	- 115,958,036,700
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UMUM KESEHATAN	1,610,387,633,000	6,401,624,326,100	1,490,523,486,160	4,962,217,487,880	93	78	4,791,236,693,100	3,471,694,001,720
<b>JUMLAH</b>	<b>8,399,610,562,400</b>	<b>23,211,885,890,100</b>	<b>7,693,986,207,368</b>	<b>20,489,970,483,278</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>14,812,275,327,700</b>	<b>12,795,984,275,910</b>

**Tabel TC.2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Bangka**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA	164,379,269,84 2	140,947,829,15 7	157,058,600,83 5	151,851,423,03 4	96,452,551,325	-	92	68	0	- 23,431,440,685	- 55,398,871,709
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127,445,362,49 0	86,844,979,583	68,751,980,104	115,511,109,18 4	40,455,244,813	-	91	47	0	- 40,600,382,907	- 75,055,864,371
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	42,431,161	-	395,194,200	42,081,161	-	-	99	0	0	0	0
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	516,891,800	464,987,800	-	478,455,820	328,697,515	-	93	71	0	- 51,904,000	- 149,758,305

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71,051,480,100	69,308,277,500	22,009,902,000	58,936,315,000	48,794,250,000	-	83	70	0	1,743,202,600	10,142,065,000
<b>JUMLAH</b>	<b>29,309,447,009,400</b>	<b>22,895,087,931,500</b>	<b>22,642,587,415,900</b>	<b>26,847,243,234,900</b>	<b>13,772,443,615,336</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>6,414,359,077,900</b>	<b>13,074,799,619,564</b>

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada dinas kesehatan yaitu langsung kepada Masyarakat.

## **2.5 Mitra Perangkat daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

### **a. BPJS**

BPJS Menjadi Layanan Mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik, dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bangka serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJS selaku mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

### **b. Rumah Sakit Swasta**

Di Kabupaten Bangka terdapat 2 Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Medika Stania dengan terakreditasi madya dan Rumah Sakit Arsani terakreditasi Utama yang merupakan Rumah Sakit rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Ke-2 Rumah Sakit ini menjadi mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam memberikan layanan Kesehatan pada masyarakat kabupaten Bangka serta memastikan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Swasta sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Kami juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kami agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memajukan bidang kesehatan di wilayah tersebut. Rumah Sakit Swasta siap untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat

## **2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dukungan PDAM terhadap Dinas Kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah beberapa cara dimana PDAM dapat memberikan dukungan terhadap Dinas Kesehatan: Penyediaan Air Bersih yang Berkualitas: PDAM bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa air yang disediakan sesuai dengan standar kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk standar yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Kerjasama dalam Survei Kualitas Air: PDAM dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan survei kualitas air bersih dan memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kualitas air yang ditentukan oleh pemerintah. Edukasi Kesehatan: PDAM dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan dan bagaimana menjaga kualitas air yang dikonsumsi. Ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan relevan. Penanggulangan Wabah Penyakit: PDAM dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tidak bersih. Ini bisa meliputi peningkatan monitoring kualitas air, peningkatan pemeliharaan jaringan distribusi air bersih, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan. Dengan dukungan PDAM, Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi, yang merupakan faktor penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2.7 Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah**

Kerja sama Dinas Kesehatan dengan PT INFOKES dalam hal Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan pelayanan prima. Pemantauan data dan layanan kesehatan untuk memudahkan pengambilan keputusan tentang kondisi kesehatan masyarakat saat ini untuk kesehatan di masa mendatang dalam satu basis

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan kesehatan Kabupaten Bangka yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	Belum adanya Maintenance (Pemeliharaan) aplikasi/sarana IT dari Kemenkes	1. Pendaftaran user baru Sistrute 2. Keterlambatan respon dari RS walaupun masih bias menggunakan secara "on call" untuk pasien yang bersifat emergensi tetapi menjadi tidak terekam atau keterlambatan input pencatatannya.
2	Telemedicine	Human error	1. Respon Rumah Sakit lambat. 2. Petugas pengelola telemedisin yang telah dilatih dipindahkan menjadi pengelola program lain dan tidak mensosialisasikan ilmunya kepada petugas yang baru.
		Sarana	Masih ada fasilitas kesehatan yang susah sinyal sehingga lambat respon
3	Universal Health Coverage (UHC)	Rendahnya Kesadaran Masyarakat	Faktor Sosial Ekonomi masyarakat
		Belum Tercapainya UHC	Untuk mencapai UHC 100% dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 22

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			M untuk mengcover 50.190 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan
4	PIS PK	Indeks Keluarga Sehat masih dibawah target	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi sering down/ eror saat petugas akan mengentri data intervensi.</li> <li>2. Petugas Puskesmas sudah melakukan intervensi ke keluarga/pasien tetapi masih banyak pasien yang kondisi kesehatannya belum terkendali sehingga belum bisa di entri ke aplikasi PIS PK.</li> <li>3. Kegiatan intervensi lanjutan sudah dilakukan tetapi petugas belum mengentri ke dalam aplikasi PIS PK.</li> </ol>
5	Akreditasi	Fasyankes belum dapat melaksanakan reakreditasi di tahun 2020-2022, menyebabkan DAK NF yang telah dialokasikan tidak terealisasi. Sementara untuk tahun 2023 di batasi pelaksanaan reakreditasi melalui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih dalam kondisi belum pulih sepenuhnya dari Pandemi Covid-19.</li> <li>2. Belum ada sosialisasi dari Kemkes terkait Instrumen akreditasi yang digunakan untuk reakreditasi.</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		DAK NF 2023 lokusnya hanya untuk puskesmas terpencil.	
6	Indikator Nasional Mutu & Indikator Keselamatan Pasien	Laporan bulanan INM dan IKP masih belum 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas fasyankes tidak melakukan pengentrian sesuai jadwal entri INM dan IKP</li> <li>2. Melakukan penilaian mutu tetapi tidak di entri ke dalam aplikasi INM/IKP</li> </ol>
7	Kompetensi Pegawai	Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM Kesehatan dikarenakan dalam 3 tahun terakhir dilakukan realokasi anggaran untuk penanganan masalah pandemi Covi-19.</li> <li>2. Keterbatasan jenis pelatihan bagi SDM Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi di wilayah Prov.Kep Babel pada umumnya dan Kabupaten Bangka Khususnya</li> <li>3. Mayoritas Pelatihan Kompetensi dilaksanakan di luar Prov Kep. Babel sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih besar</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	STR/SIP	Tenaga Kesehatan belum memahami fungsi STR/SIP	Tenaga Kesehatan wajib mengikuti pelatihan kompetensi untuk kelengkapan perpanjangan STR dikarenakan terkendala biaya yang tinggi dan penyelenggaraan pelatihan banyak diselenggarakan diluar Prov.Kep.Babel
3	Survey Pembangunan	Belum optimalnya pemantauan pembangunan puskesmas dan rumah sakit	Pengembangan Puskesmas dan RS yang Berjumlah 15 Faskes dan berlokasi jauh dari Dinas Kesehatan sehingga dibutuhkan anggaran perjalanan untuk Survey Lokasi ke 15 faskes bersama tim Lintas sektor untuk pemantauan Pembangunan.
4	Pemeliharaan Alkes	Masih belum memadai dalam pengalokasian pembiayaan Kesehatan di tatanan fasyankes	Banyaknya alkes yang ada di faskes yang perlu di kalibrasi tiap tahun sehingga dibutuhkan anggaran kalibrasi alkes untuk pemeliharaan Alkes
5	Prasarana penunjang farmasi	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Farmasi	Belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan sarana dan prasarana penunjang farmasi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Penumpukan obat Program kedaluarsa	Terlalu banyaknya obat yang di droping dari povinsi	Kurang koordinasi antara pengelola program kabupaten dengan pengelola program provinsi terkait kebutuhan obat program
1	Posyandu Aktif	Belum tercapainya target indikator posyandu aktif	target indikator Posyandu aktif yang masih dibawah 50% yaitu Cakupan D/S
		Ketidak selarasan penggunaan indicator sasaran posyandu	Sasaran Kabupaten Tidak sama dengan sasaran di Desa atau posyandu sehingga selisih perhitungan sangat jauh berbeda
		Belum memadai sarana dan prasaran posyandu	Masih banyak belum tersedianya lahan dan Bangunan untuk posyandu, masih banyak posyandu yang masih menumpang di rumah warga dan kantor Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih Minim Nya Dukungan Kepala Desa untuk memenuhi sarana dan Prasarana Posyandu Yang memenuhi standar
		Belum optimalnya dukungan lintas sector terkait	Kurang nya Dukungan Lintas Sektor Terkait Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Posyandu
2	Kesehatan Kerja dan Olahraga	Belum optimal kualitas pengelola program	Kegiatan Aktifitas Fisik dan Tes Kebugaran, masih belum maksimal dilaksanakan karena Pengelola Program di Puskesmas Sering Berganti
			Monitoring dan Pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan masih Belum Maksimal karena Pengelola nya masih sering berganti
			Kurang nya Pembinaan Kelompok Olahraga Masyarakat yang melaksanakan Aktifitas Fisik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pos UKK kurang Aktif	Kurang dimanfaatkan oleh Para pekerja di UMKM, karena Kurangnya Keaktifan dari Pengelola Program yang mengakibatkan Pos UKK banyak tidak dimanfaatkan
3	Upaya Promosi Kesehatan	Pendanaan	Kurangnya Suport Dana APBD terkait Belanja Publikasi Promosi Kesehatan Karena dana Pembiayaan dari Pusat terbatas
4	Kunjungan Balita setiap bulan rendah	Masih banyak balita yang tidak datang ke posyandu, hanya sampai usia imunisasi	1. Sasaran balita proyeksi
			2. Pemahaman masyarakat rendah tentang manfaat pemantauan pertumbuhan
5	Antropometri di posyandu belum lengkap dan terstandar	Pengukuran status gizi kurang akurat	1. kalibrasi alat sebelum di gunakan
			2. Pengetahuan kader masih kurang dalam pemantauan pertumbuhan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Dana Jampersal Rujukan	Penyerapan Dana anggaran jampersal rujukan dari DAK NON Fisik masih sangat kecil	Belum semua Fasyankes menggunakan dana anggaran DAK Non Fisik bila merujuk pasien dari rumah pasien ke FKTP dan ke Rumah Sakit
7	Kematian Ibu	Kematian ibu hingga september 2022 ada 3 bulin	Pemantauan wilayah setempat dari bidan puskesmas hingga bidan desa belum optimal
8	E-Kohort	Data ibu hamil yang di entry dalam e kohort belum sama dengan data pada laporan PWS	Pada waktu maintenance sistem ekohort tidak bisa melakukan entry data
9	Kematian Bayi	Kematian bayi hingga Septemer 2022 ada 10 bayi	Belum optimalnya kerjasama lintas sektor untuk mendukung menurunkan Angka Kematian Bayi
			Masih tingginya kehamilan di bawah usia 20 tahun dan diatas usia 35 tahun
			Masih banyaknya remaja putri/ calon wanita hamil dan ibu hamil yang anemia sehingga menyebabkan banyaknnya kasus kematian bayi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya pengetahuan calon ibu/ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya untuk persiapan kehamilan
10	E-PUS	Masih ada entry program e-pus yang masih rendah	Masih rendahnya pengetahuan ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara teratur/standar ke fasilitas Kesehatan
7	Kompetensi Pegawai	Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan belum memadai	1. Sangat terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM Kesehatan dikarenakan dalam 3 tahun terakhir dilakukan realokasi anggaran untuk penanganan masalah pandemi Covi-19.
			2. Keterbatasan jenis pelatihan bagi SDM Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun provinsi di wilayah Prov.Kep Babel pada umumnya dan Kabupaten Bangka Khususnya
			4. Mayoritas Pelatihan Kompetensi dilaksanakan di luar Prov Kep. Babel sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih besar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	STR/SIP	Tenaga Kesehatan belum memahami fungsi STR/SIP	Tenaga Kesehatan wajib mengikuti pelatihan kompetensi untuk kelengkapan perpanjangan STR dikarenakan terkendala biaya yang tinggi dan penyelenggaraan pelatihan banyak diselenggarakan diluar Prov.Kep.Babel
3	Survey Pembangunan	Belum optimalnya pemantauan pembangunan pengembangan puskesmas dan rumah sakit	Pengembangan Puskesmas dan RS yang Berjumlah 15 Faskes dan berlokasi jauh dari Dinas Kesehatan sehingga dibutuhkan anggaran perjalanan untuk Survey Lokasi ke 15 faskes bersama tim Lintas sektor untuk pemantauan Pembangunan.
4	Pemeliharaan Alkes	Masih belum memadai dalam pengalokasian pembiayaan Kesehatan di tatanan fasyankes	Banyaknya alkes yang ada di faskes yang perlu di kalibrasi tiap tahun sehingga dibutuhkan anggaran kalibrasi alkes untuk pemeliharaan Alkes
5	Prasarana penunjang farmasi	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Farmasi	Belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan sarana dan prasarana penunjang farmasi.
6	Penumpukan obat Program kedaluarsa	Terlalu banyaknya obat yang di droping dari povinsi	Kurang koordinasi antara pengelola program kabupaten dengan pengelola program provinsi terkait kebutuhan obat program
1	Posyandu Aktif	Belum tercapainya target indikator posyandu aktif	target indikator Posyandu aktif yang masih dibawah 50% yaitu Cakupan D/S

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketidak selarasan penggunaan indicator sasaran posyandu	Sasaran Kabupaten Tidak sama dengan sasaran di Desa atau posyandu sehingga selisih perhitungan sangat jauh berbeda
		Belum memadai sarana dan prasaran posyandu	Masih banyak belum tersedianya lahan dan Bangunan untuk posyandu, masih banyak posyandu yang masih menumpang di rumah warga dan kantor Desa
			Masih Minim Nya Dukungan Kepala Desa untuk memenuhi sarana dan Prasarana Posyandu Yang memenuhi standar
		Belum optimalnya dukungan lintas sector terkait	Kurang nya Dukungan Lintas Sektor Terkait Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Posyandu
2	Kesehatan Kerja dan Olah raga	Belum optimal kualitas pengelola program	Kegiatan Aktifitas Fisik dan Tes Kebugaran, masih belum maksimal dilaksanakan karena Pengelola Program di Puskesmas Sering Berganti
			Monitoring dan Pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan masih Belum Maksimal karena Pengelola nya masih sering berganti

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya Pembinaan Kelompok Olahraga Masyarakat yang melaksanakan Aktifitas Fisik
		Masih rendahnya pemanfaatan pos UKK	Kurang dimanfaatkan oleh Para pekerja di UMKM, karena Kurangnya Keaktifan dari Pengelola Program yang mengakibatkan Pos UKK banyak tidak dimanfaatkan
3	Upaya Promosi Kesehatan	Masih belum memadai dalam pengalokasian pembiayaan Kesehatan	Kurangnya Suport Dana APBD terkait Belanja Publikasi Promosi Kesehatan Karena dana Pembiayaan dari Pusat terbatas
4	Kunjungan Balita setiap bulan rendah	Masih rendahnya pemahaman masyarakat & pemanfaatan fungsi posyandu	Masih banyak balita yang tidak datang ke posyandu, hanya sampai usia imunisasi
5	Alat Kesehatan penunjang posyandu	Antropometri di posyandu belum lengkap dan terstandar	Pengukuran status gizi kurang akurat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Dana Jampersal Rujukan	Penyerapan Dana anggaran jampersal rujukan dari DAK NON Fisik masih sangat kecil	Belum semua Fasyankes menggunakan dana anggaran DAK Non Fisik bila merujuk pasien dari rumah pasien ke FKTP dan ke Rumah Sakit
7	Kematian Ibu	Masih adanya kasus kematian ibu	Pemantauan wilayah setempat dari bidan puskesmas hingga bidan desa belum optimal
			Kematian ibu hingga september 2022 ada 3 bulin
8	E-Kohort	Data ibu hamil yang di entry dalam e kohort belum sama dengan data pada laporan PWS	Pada waktu maintenance sistem ekohort tidak bisa melakukan entry data
9	Kematian Bayi	Masih adanya kasus kematian Bayi	Belum optimalnya kerjasama lintas sektor untuk mendukung menurunkan Angka Kematian Bayi
			Masih tingginya kehamilan di bawah usia 20 tahun dan diatas usia 35 tahun
			Kematian bayi hingga Septemer 2022 ada 10 bayi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih banyaknya remaja putri/ calon wanita hamil dan ibu hamil yang anemia sehingga menyebabkan banyaknya kasus kematian bayi
			Masih rendahnya pengetahuan calon ibu/ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya untuk persiapan kehamilan
1	Penyakit Menular	Belum optimalnya kegiatan Penjangkauan Penderita Penyakit Menular	belum maksimalnya penemuan dan pengobatan penderita TBC
			belum maksimalnya penemuan dan pengobatan penderita HIV
			masih rendahnya penemuan dan pengobatan penderita Penyakit Menular lainnya (Malaria, ISPA/Pneumonia, Hepatitis, Kecacingan, Filariasis, IMS, Diare, GHPR)
2	Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya Prevalensi Penyakit Tidak Menular	Penderita DM tidak patuh dalam mengkonsumsi obat
			Kurang patuhnya Penderita HT dalam mengkonsumsi obat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya Pelayanan Kesehatan ODGJ tanpa keluarga pasca treatment RSJ
			Skrining Usia Produktif belum maksimal karena belum menjangkau seluruh sasaran
3	Surveilans Penyakit	Belum optimalnya kegiatan Deteksi Dini Penyakit Menular dan Tidak Menular	perlu peningkatan koordinasi SKDR antara jaringan dan jejaring dinas kesehatan
4	Penyehatan Lingkungan	Belum optimalnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	cakupan jamban belum mencapai 100%
			cakupan air limbah memenuhi syarat masih di bawah 50%
			cuci tangan pakai sabun belum diterapkan oleh setiap keluarga
			pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik, sehingga masih menjadi faktor resiko penyakit menular
			cakupan air minum belum mencapai 100%

### **3.2 Isu-isu Strategis**

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka ditinjau dari gambaran pelayanan Dinkes, dan isu yang berkembang saat ini, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan yang menjadi perhatian Dinkes Kabupaten Bangka dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka. Isu strategis yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena kasus kematian ibu dan kematian bayi (AKI/AKB) masih ditemukan setiap tahun dan fluktuatif.
2. Mutu pelayanan kesehatan masih perlu peningkatan karena tuntutan pelayanan publik akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan belum adanya puskesmas yang terakreditasi paripurna di Kabupaten Bangka.
3. Beban ganda penyakit (*Double Burden Diseases*), penyakit menular masih terus bermunculan dan perlu dilakukan pengendalian seiring dengan peningkatan kejadian kasus penyakit.
4. Indeks Keluarga Sehat yang masih rendah.
5. Kejadian gizi buruk cukup rendah dan masih di bawah target nasional, tetapi prevalensi stunting cukup tinggi dan menjadi lokus intervensi bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta rendahnya cakupan ASI Eksklusif dan pemantauan status gizi pada balita.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan terkait pemanfaatan sistem informasi kesehatan.

7. Kualitas kesehatan lingkungan yang belum optimal, walaupun akses penggunaan jamban relatif tinggi di atas 80% akan tetapi desa dengan status ODF (Odd Defecation Free) masih rendah.
8. Belum terwujudnya *universal coverage*
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang belum mencapai
10. Perencanaan dan monitoring evaluasi bidang kesehatan melalui beberapa mekanisme sehingga belum efektif.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

#### 4.1.a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Target Indikator Sasaran		
					1	2	3
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas selama 1 tahun di bagi Jumlah lahir hidup selama 1 tahun x 100.000 KH	100	99,50	99,00
			AKB	Jumlah kematian bayi selama 1 tahun di bagi Jumlah lahir hidup selama 1 tahun x 1000 KH	5,00	4,75	4,50
			Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk	Jumlah Kasus Gizi buruk balita berdasarkan BB/TB di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh balita pada periode tertentu di suatu wilayah dikali 100	0,02	0,02	0,02
			Angka Kesakitan	Jumlah Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas dibagi Jumlah Penduduk X 100%	13,20	13,15	13,10
Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai PMPRB PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	80,00	80,05	80,10

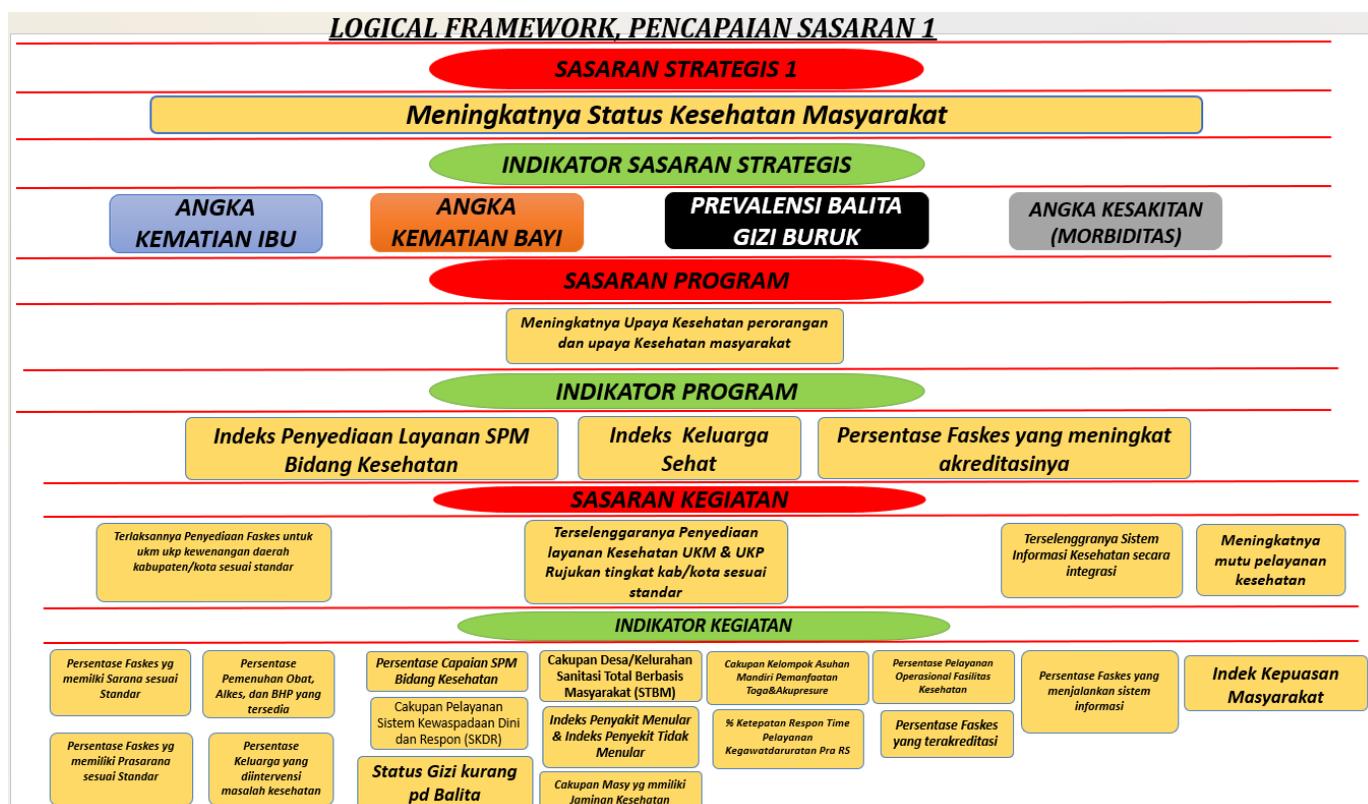
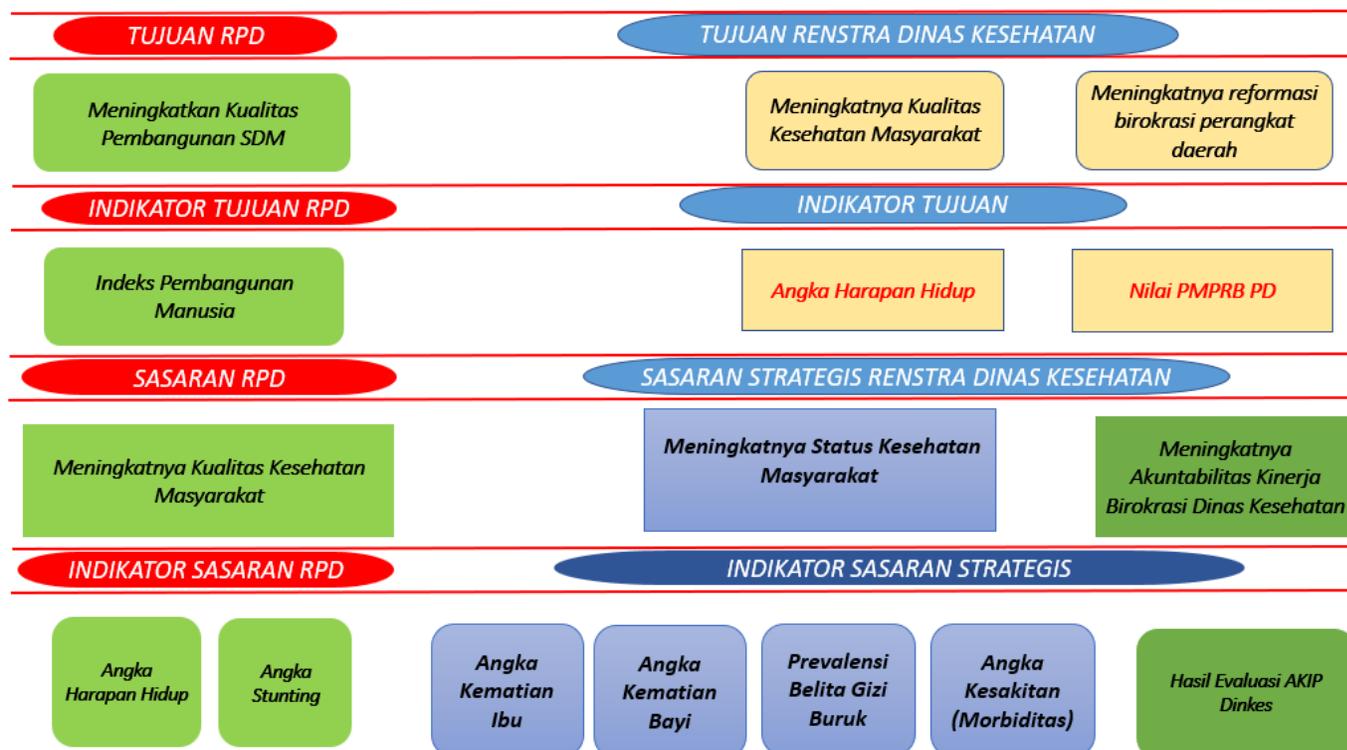
**4.1.b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah**

Tabel T-C.26  
Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Kabupaten/Kota

No	Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4
1.	Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.</li> <li>b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.</li> <li>c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.</li> <li>d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>e. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).</li> <li>b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.</li> <li>c. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.</li> <li>d. Penetapan standar pengembangan kapasitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.</li> <li>b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

		<p>SDM kesehatan.</p> <p>f. e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.</p>	
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<p>a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional.</p> <p>b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan.</p> <p>d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.</p>	<p>a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</p> <p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>a. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

## 4.2 Cascading



**SASARAN STRATEGIS 1**

**Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat**

**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**

ANGKA  
KEMATIAN IBU

ANGKA  
KEMATIAN BAYI

PREVALENSI BALITA  
GIZI BURUK

ANGKA KESAKITAN  
(MORBIDITAS)

**SASARAN PROGRAM**

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya  
Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Meningkatnya Pengawasan Keamanan  
Obat dan makanan minuman

**INDIKATOR PROGRAM**

Persentase peningkatan kapasitas SDM  
sesuai standar

Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan  
keamanan Pangan yang beredar sesuai standar

**SASARAN KEGIATAN**

Terlaksananya pemberian izin  
peraktek tenaga Kesehatan

Terencannya kebutuhan  
dan pendayagunaan SDM

Meningkatnya  
pengembangan mutu dan  
kompetensi teknis SDM

Terselenggaranya  
Pemberian izin  
Sarana kesehatan

Terselenggaranya  
rekomendasi  
penerbitan sertifikat  
produk PIRT

Meningkatnya  
keamanan produk  
pangan industri rumah  
tangga

**INDIKATOR KEGIATAN**

Persentase Tenaga Kesehatan  
yg memiliki SIP

Persentase Faskes dengan  
jenis tenaga sesuai  
standar

Persentase Tenaga Kesehatan  
yang memenuhi standar  
kompetensi

Cakupan  
pengawasan  
Sarana  
Kefarmasian

Cakupan  
Industri yang  
memiliki  
Sertifikat PIRT

Cakupan pengawasan  
sarana IRTP (Industri  
Rumah Tangga  
Pangan)

Cakupan Tenaga Kesehatan  
yang memiliki STR

**SASARAN STRATEGIS 1**

**Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat**

**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**

ANGKA  
KEMATIAN IBU

ANGKA  
KEMATIAN BAYI

PREVALENSI BALITA  
GIZI BURUK

ANGKA KESAKITAN  
(MORBIDITAS)

**SASARAN PROGRAM**

Meningkatnya Prilaku  
Hidup Bersih dan sehat

**INDIKATOR PROGRAM**

Indeks RT yang ber PHBS

**SASARAN KEGIATAN**

Meningkatnya pemberdayaan &  
peningkatan peran serta  
masyarakat

Meningkatnya  
pengembangan &  
Pelaksanaan UKBM

**INDIKATOR KEGIATAN**

Persentase Advokasi dan  
pemberdayaan  
masyaraat bidang  
kesehatan

Cakupan Penyelenggaraan  
Upaya Kesehatan  
Bersumber Daya  
Masyarakat

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terpenuhnya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Tersedianya RS yg Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan & SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan RS berdasarkan Kelas RS yg Memenuhi Rasio Tempat Tidur Trhdp Jmlh Pnddk Minimal 1:1000

Tersedianya PKM yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar

*Tersedianya pengembangan fasilitas kesehatan lainnya sesuai standar*

Tersedianya Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000

Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun

Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun

Jmlh RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan & SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas RS yg melindungi rasio tempat tidur terhadap jmlh pnddk minimal 1:1000

Jmlh PKM yang ditingkatkan sarana, prasarana, alkes, & SDM agar sesuai standar

*Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar*

Jmlh sarana, prasaran & alkes yang telah dilakukan program rehabilitasi & pemeliharaan oleh rumah sakit

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Tersedianya Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas

Tersedianya Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tersedianya Sarana & Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi & Pemeliharaan

Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center

Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jlh sarana, prasaran dan alkes yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas

Jmlh Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jmlh sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi pemeliharaan

Jumlah Sarana difasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yg disediakan DINKES, RS, & Lab

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenance (DINKES & RS)

Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang diawali tahapan kunjungan keluarga

Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah obat dan vaksin yang disediakan DINKES & RS

'Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

**SASARAN SUB KEGIATAN**

*Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar*

*Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar*

*Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar*

*Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar*

*Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar*

*Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar*

*Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar*

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jlh anak usia pendidikan dasar yg mndpt pelayanan keshtan sesuai standar

Jmlh penduduk usia produktif yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sndr

Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Stndr	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sesuai Standar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGI Berat Sesuai Standar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pnddk pd Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
---	--	---	--	---	--

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jmlh penderita hipertensi yg mendptkn pelayanan kesehatan sesuai Stndr	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jmlh orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ODGI berat sesuai standar	Jmlh Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yg Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan yankes sesuai standar	Jmlh dokmn hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi pnddk pd kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar
--	--	---	---	---	---

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri & Tradisional Lainnya
--	---	--	--	---	---

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

'Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	'Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
--	--	--	---	---	--

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) & Sekolah	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium
--	--	---	--	--	--	--

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	'Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jmlh penyalahgunaan NAPZA yg mendptkn pelayanan kesehatan	Jmlh dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular & tidak menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jmlh orang yg menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) & sekolah	Jumlah spesimen penyakit pontensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan
---	---	---	---	---	---	---

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
---------------------------------------	---	---	---	---	--

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Jmlh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine utk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yg berkualitas	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditas di kabupaten/kota
---	--	--	--	--	--

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan malaria
--	--	---	--	---

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jmlh laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi & pemberian obat massal)	Jumlah public safety center (psc 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah orang yg menderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah dokumen pelayanan Kesehatan malaria
---	--	--	---	--

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan

Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)

Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan

Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan

Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah Apotek, Toko obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan aptoke, toko obat, toko alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah apotek, Toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)

Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT

Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman IRT beredar yang dilakukan pemeriksaan Pos Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jmlh dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraam & pemberdayaan masyarakat

Jmlh dokumen hasil bimbingan teknis dan supevisi upaya kesehatan bersumber daya masyarkat (UKBM)

## TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

## SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI DINKES

## INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Hasil Evaluasi AKIP Dinkes

## SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

## INDIKATOR PROGRAM

Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah

Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah

Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan PD dalam LHP BPK-RI

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

## SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD

Meningkatnya Kepatuhan terhadap kelengkapan Atribut pegawai

Meningkatnya Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya a Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya layanan jasa penunjang perangkat daerah

Meningkatnya pemenuhan sarana & prasarana pendukung kinerja

Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah

## INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar

Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar

Opini Kinerja BLUD

Persentase Pegawai yang mengenakan atribut lengkap

Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah

Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di perangkat daerah

Persentase penambahan aset perangkat daerah

Persentase barang milik daerah yang dipelihara

Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai Standar

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Lap Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jmlh Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah Orang yg Menerima Gaji & Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah blud yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan RS & PKM

**SASARAN SUB KEGIATAN**

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1. Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Tersedianya Mebel

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah paket Mebel yang disediakan

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi

**SASARAN SUB KEGIATAN**

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai siklus kehidupan sesuai standar yang berkualitas.	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan ibu terstandar
			2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita sesuai standar
			3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan pada usila lanjut
			4. Meningkatkan akses dan pelayanan gizi kesehatan masyarakat
			5. Memperkuat upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
		2. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit serta penyehatan lingkungan	6. Meningkatkan Upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular
			7. Melakukan pengendalian terhadap faktor Risiko Penyakit tidak menular
			8. Meningkatkan upaya sanitasi total berbasis masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkes	3 Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	9 Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah 10 Meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi sumber daya kesehatan 11 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan penataan sistem rujukan 12 Meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan 13 Memperkuat sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat
		3. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan  4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah	14 Meningkatkan kapasitas sumber daya penunjang 15 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

BAB VI  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(4)	(5)	(6)					(15)	(16)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				Angka Harapan Hidup	70.65	71.00		71.10		71.15		71.15				data diperoleh dari BPS
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	54.63	100		99,50		99,00		99,00				Jumlah Kematian Karena Kehamilan, Persalinan, masa nifas atau komplikasi-komplikasi selama 1 periode dibagi Jumlah Kelahiran hidup selama periode yang sama dikali 100.000
				Angka Kematian bayi (per 1.000 KH)	8.40	5,00		4,75		4,50		4,50				Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup diwilayah pada kurun waktu yang sama
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.022	0,02		0,02		0,02		0,02				Jumlah kasus gizi buruk balita berdasarkan BB/TB disuatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah seluruh balita yang ada disuatu wilayah periode tertentu dikali 100%
				Angka Kesakitan (Morbiditas)	15.34	13,20		13,15		13,10		13,10				Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas dibagi jumlah penduduk dikali 100% (data BPS)
Sasaran Program 1	Meningkatnya Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan	82%	100%	57,224,697,394	100%	61,564,167,133	100%	63,566,610,310	100%	182,355,474,838	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	(Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80%) + (Persentase Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20%)
				Indeks Keluarga Sehat	0.43	0,43 Indeks	328,800,000	0,44 Indeks	361,680,000	0,45 Indeks	370,480,000	0,45 Indeks	1,060,960,000			Hasil dari 12 indikator IKS dibagi 12
				Persentase Faskes yang meningkat akreditasinya	0%	100%	52,501,212,606	100%	54,249,211,267	100%	57,348,299,753	100%	164,098,723,626			Jumlah Fasyankes yang meningkat status akreditasinya dibagi jumlah Fasyankes yang disurvei akreditasi dikali 100
Sasaran Kegiatan 1.1	Terlaksananya Penyediaan Faskes untuk ukm ukp kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai standar	1.02.02.2.01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Faskes yg memiliki Sarana sesuai Standar	100%	100%	32,654,700,000	100%	33,462,170,000	100%	35,401,187,000	100%	101,518,057,000			Jumlah Fasyankes yang memiliki sarana terstandar / Jumlah Fasyankes yang ada x 100% (liat di aspak)
				Persentase Faskes yg memiliki Prasarana sesuai Standar	80%	82%	1,051,000,000	83%	1,101,100,000	84%	1,211,210,000	84%	3,363,310,000			Jumlah Fasyankes yang memiliki prasarana terstandar /Jumlah Fasyankes yang ada x 100% (liat di aspak)
				Persentase Pemenuhan Obat, Alkes, dan BHP yang tersedia	60%	64.33	18,012,512,606	66.00	18,824,641,267	67.67	19,832,952,753	67.67	56,670,106,626			(Persentase obat sesuai farmas) + (Persentase bhp dg kompodium alkes non elektrometik)+ (Persentase Pemenuhan Alkes Elektromedi) dibagi 3
				Persentase Keluarga yang diintervensi masalah kesehatan	Na	58%	80,000,000	62%	88,000,000	67%	96,800,000		264,800,000			Jumlah Keluarga yang diintervensi masalah kesehatan dibagi jumlah keluarga (KK) * 100 %
	Terpenuhnya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta sarana dan Prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	0%	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	5,000,000,000			
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	0%	1 Unit	2,500,000,000	1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	3,000,000,000			
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Na	3 Unit	602,700,000	4 Unit	662,970,000	5 Unit	729,267,000	12 Unit	1,994,937,000			
	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01.05	Sub kegiatan pengembangan rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang melindungi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	3 unit	3 unit	762,000,000	3 unit	790,200,000	3 unit	832,020,000	3 unit	2,384,220,000			
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.06	Sub kegiatan pengembangan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alkes, dan SDM agar sesuai standar	1 unit	6 unit	11,690,000,000	9 unit	11,984,000,000	12 unit	12,342,400,000	12 unit	36,016,400,000			
	Tersedianya pengembangan fasilitas kesehatan lainnya sesuai standar	1.02.02.2.01.07	Sub kegiatan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Na	2 Unit	1,000,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	4 Unit	2,000,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01.08	Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alkes yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	3 unit	3 unit	4,400,000,000	3 unit	4,520,000,000	3 unit	5,082,000,000	9 unit	14,002,000,000			
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.09	Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alkes yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas		4 unit	900,000,000	4 unit	960,000,000	6 unit	1,006,000,000	14	2,866,000,000			
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.10	Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		32 unit	4,300,000,000	34 unit	4,410,000,000	36 unit	4,961,000,000	102	13,671,000,000			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01.11	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi pemeliharaan		12 unit	1,800,000,000	14 unit	1,815,000,000	16 unit	1,996,500,000	42 Unit	5,611,500,000			
	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.01.12	Sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan		12 unit	1,200,000,000	12 unit	1,320,000,000	12 unit	1,452,000,000	36 Unit	3,972,000,000			
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.01.14	Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang disediakan		156 unit	8,205,000,000	156 unit	8,405,500,000	156 unit	8,728,050,000	468 Unit	25,338,550,000			
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Centre	1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenanc		4 unit	951,000,000	4 unit	991,100,000	4 unit	1,090,210,000	12 Unit	3,032,310,000			
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.01.20	Sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1 unit	1 unit	100,000,000	1 unit	110,000,000	1 unit	121,000,000	3 unit	331,000,000			
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.23	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, vaksin dan BMHP yang disediakan		4 Paket	9,806,512,606	4 Paket	10,418,041,267	4 Paket	11,103,692,753	12 Unit	31,328,246,626			
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang diawali tahapan kunjungan keluarga	1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	Na	102.188 Keluarga	80,000,000	102.200 Keluarga	88,000,000	102.215 Keluarga	96,800,000	306603 Keluarga	264,800,000			
	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	1 Paket	1,000,000	15 Paket	1,100,000	15 Paket	1,210,000	31 Unit	3,310,000			
Sasaran Kegiatan 1.2	Terseleenggaranya Penyediaan layanan Kesehatan UKM & UKP Rujukan tingkat kab/kota sesuai standar	1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	82%	100%	2,985,814,700	100%	3,314,396,170	100%	3,576,338,947	100%	9,876,549,817			Hasil dari 12 indikator capaian SPM dibagi 12
				Cakupan Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100%	100%	267,900,000	100%	294,690,000	100%	323,119,000	100%	885,709,000			Jumlah kejadian penyakit berpotensi wabah /KLB yang ditangani dalam 1x 24 jam dibagi dengan jumlah kejadian / kasus berpotensi KLB/wabah yang dilaporkan melalui SKDR dikali 100%
				Status Gizi Kurang pada Balita	1,2%	8%	171,062,964	7,90%	188,169,260	7,80%	233,000,000	7,80%	592,232,224			Jumlah balita yang diukur status gizi (BB/TB) di bagi jumlah balita di kali 100
				Cakupan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	6%	7.41%	240,213,000	8.64%	258,734,300	9.88%	274,507,730	9.88%	773,455,030			Jumlah Desa/Kel yang STBM dibagi Jumlah seluruh Desa/Kel dikali 100%
				Indeks Penyakit menular dan Tidak Menular	47%	42%	869,205,730	41%	961,626,303	41%	1,051,598,933	41%	2,882,430,966			Jumlah penderita penyakit menular (Tb, HIV, malaria, kusta, hepatitis, DBD, Filaria) dibagi kelompok beresiko dikali 100 (dihitung persennakit kemudian ditambah semua indeks
				Cakupan Masyarakat yg memiliki Jaminan Kesehatan	86%	87%	2,500,000,000	89%	2,650,000,000	90%	2,800,000,000	90%	7,950,000,000			jumlah masyarakat memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 100%
				Cakupan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresure	100%	100%	54,170,000	100%	59,587,000	100%	65,545,700	100%	179,302,700			kelompok asuhan mandiri yang memanfaatkan tanaman obat keluarga dan pelayanan akupresure dibagi kelompok asuhan kemandirian dikali 100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Ketepatan Respon Time Pelayanan Kegawatdaruratan Pra RS	100%	100%	1,830,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,100,000,000	100%	5,930,000,000			Jumlah penanganan kasus kegawatdaruratan dilokasi kejadian dalam waktu ≤ 10 menit dibagi semua kasus gawat darurat yang ditangani dilokasi kejadian dikali 100%
				Persentase Pelayanan Operasional Fasilitas Kesehatan Persentase Faskes yang terakreditasi	100%	100%	48,005,627,000	100%	51,506,189,700	100%	52,800,500,000	100%	152,312,316,700			Jumlah Pelayanan Operasional Pada Faskes dibagi Jumlah Faskes dikali 100
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	1.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5035	5897%	300,704,000 200,000,000	6410%	330,774,400 220,000,000	6923%	342,000,000 242,000,000	6923%	973,478,400 662,000,000			
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	1.02.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5237	5766 org	310,000,000	6054	341,000,000	6357	375,100,000	18177 Org	1,026,100,000			
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	1.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5187	5491 org	145,000,000	5766	159,500,000	6054	175,450,000	17311 Org	479,950,000			
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	1.02.02.2.02.04	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25338	28695 org	554,050,000	30130	609,455,000	31636	670,400,500	90461 Org	1,833,905,500			
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	1.02.02.2.02.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57396	58000 org	157,000,000	59820	172,700,000	62811	189,970,000	179603 Org	519,670,000			
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	1.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	147450	206739 org	108,500,000	208158	119,350,000	210448	131,285,000	625345 Org	359,135,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	1.02.02.2.02.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23226	27370 org	625,204,000	28738	717,724,400	30175	720,000,000	86283 Org	2,062,928,400			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	1.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46614	65223 org	33,800,000	65225	37,180,000	65300	40,898,000	195748 Org	111,878,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sesuai Standar	1.02.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6754	6800 org	30,800,000	6868	33,880,000	7342	37,268,000	20204 Org	101,948,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	619	619 org	100,000,000	620	110,000,000	622	121,000,000	1674 Org	331,000,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	1.02.02.2.02.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7546	7550 org	544,875,000	7600	599,362,500	7650	659,298,750	16530 Org	1,803,536,250			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapatkan yankes sesuai standar	9255	9300 org	176,585,700	9350	194,244,270	9400	213,668,697	28136 Org	584,498,667			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	14,300,000	1 Dokumen	15,730,000	3 Dokumen	43,030,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.02.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,420,000	3 Dokumen	6,620,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	171,062,964	12 Dokumen	188,169,260	12 Dokumen	233,000,000	36 Dokumen	592,232,224			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.16	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan Olah raga	24 Dokumen	24 Dokumen	39,000,000	24 Dokumen	42,900,000	24 Dokumen	44,000,000	72 Dokumen	125,900,000			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	24 Dokumen	24 Dokumen	30,213,000	24 Dokumen	33,234,300	24 Dokumen	36,557,730	72 Dokumen	100,005,030			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	101,720,000	12 Dokumen	111,892,000	12 Dokumen	123,081,200	36 Dokumen	336,693,200			
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.19	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	54,170,000	12 Dokumen	59,587,000	12 Dokumen	65,545,700	36 Dokumen	179,302,700			
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.20	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	227,900,000	12 Dokumen	250,690,000	12 Dokumen	275,759,000	36 Dokumen	754,349,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	1.02.02.2.02.21	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Na	1458 Orang	41,360,000	1438 Orang	45,496,000	1418 Orang	50,045,600	1418	136,901,600			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	1.02.02.2.02.22	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	na	17 Orang	65,000,000	20 Orang	71,000,000	24 Orang	77,600,000	24 Org	213,600,000			
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.25	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	18 Dokumen	18 Dokumen	280,125,730	18 Dokumen	307,138,303	18 Dokumen	336,852,133	54 Dokumen	924,116,166			
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.26	Sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	2,500,000,000	12 Dokumen	2,650,000,000	12 Dokumen	2,800,000,000	36 Dokumen	7,950,000,000			
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	na	4914 orang	116,000,000	4920 orang	134,600,000	4930 orang	149,560,000	14764 Orang	400,160,000			
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	1.02.02.2.02.28	Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensia KLB ke laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Na	150 Paket	96,000,000	160 Paket	105,600,000	170 Paket	116,160,000	480 Paket	317,760,000			
	Terseleenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	10 Dokumen	10 Dokumen	210,000,000	10 Dokumen	225,500,000	10 Dokumen	237,950,000	30 Dokumen	673,450,000			
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1.02.02.2.02.30	Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Na	8 unit	1,000,000	12 unit	1,100,000	12 unit	1,210,000	32 Dokumen	3,310,000			
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.32	Sub kegiatan operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit	36 dokumen	36 dokumen	25,280,000,000	36 dokumen	26,808,000,000	36 dokumen	27,000,500,000	108 Dokumen	79,088,500,000			
			Operasional Pelayanan RSUD Depati Bahrin	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Depati Bahrin	12 Dokumen	12 Dokumen	13,580,000,000	12 Dokumen	14,938,000,000	12 Dokumen	16,431,800,000		44,949,800,000			
			Operasional Pelayanan RSUD Eko Maulana Ali	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Eko Maulana Ali	12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000,000	12 Dokumen	7,920,000,000	12 Dokumen	8,712,000,000		23,832,000,000			
			Operasional Pelayanan RSUD Syafrie Rachman	Jumlah dokumen operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Syafrie Rachman	12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000,000	12 Dokumen	4,950,000,000	12 Dokumen	5,445,000,000		14,895,000,000			
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.33	Sub Kegiatan operasional pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas:	144 Dokumen	144 Dokumen	20,000,627,000	144 Dokumen	21,700,689,700	144 Dokumen	22,650,000,000	432 Dokumen	64,351,316,700			
			Operasional pelayanan Puskesmas Kenanga	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Kenanga	12 Dokumen	12 Dokumen	2,277,000,000	12 Dokumen	2,404,700,000	12 Dokumen	2,645,170,000		7,326,870,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Belinyu	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Belinyu	12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000,000	12 Dokumen	2,100,000,000	12 Dokumen	2,310,000,000		6,410,000,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Gunung Muda	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Muda	12 Dokumen	12 Dokumen	1,046,000,000	12 Dokumen	1,150,600,000	12 Dokumen	1,265,660,000		3,462,260,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Sunaailat	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Sunaailat	12 Dokumen	12 Dokumen	1,032,000,000	12 Dokumen	1,135,200,000	12 Dokumen	1,248,720,000		3,415,920,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Baturusa	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Baturusa	12 Dokumen	12 Dokumen	1,340,000,000	12 Dokumen	1,474,000,000	12 Dokumen	1,621,400,000		4,435,400,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Pemali	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Pemali	12 Dokumen	12 Dokumen	1,485,241,000	12 Dokumen	1,633,765,100	12 Dokumen	1,797,141,610		4,916,147,710			
			Operasional pelayanan Puskesmas Bakam	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Bakam	12 Dokumen	12 Dokumen	2,120,000,000	12 Dokumen	2,232,000,000	12 Dokumen	2,455,200,000		6,807,200,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Riauslip	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Riauslip	12 Dokumen	12 Dokumen	1,600,000,000	12 Dokumen	1,760,000,000	12 Dokumen	1,936,000,000		5,296,000,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Puding Besar	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Puding Besar	12 Dokumen	12 Dokumen	1,276,000,000	12 Dokumen	1,403,600,000	12 Dokumen	1,543,960,000		4,223,560,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Petaling	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Petaling	12 Dokumen	12 Dokumen	2,861,000,000	12 Dokumen	3,147,100,000	12 Dokumen	3,461,810,000		9,469,910,000			
			Operasional pelayanan Puskesmas Sinar Baru	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Sinar Baru	12 Dokumen	12 Dokumen	1,358,386,000	12 Dokumen	1,494,224,600	12 Dokumen	1,643,647,060		4,496,257,660			
			Operasional pelayanan Puskesmas Penagan	- Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas Penagan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,605,000,000	12 Dokumen	1,765,500,000	12 Dokumen	1,942,050,000		5,312,550,000			
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.34	Sub kegiatan pelaksanaan pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,725,000,000	12 Dokumen	2,997,500,000	12 Dokumen	3,150,000,000	36 Dokumen	8,872,500,000			
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.35	Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Na	23 unit	300,704,000	25 unit	330,774,400	27 unit	342,000,000	75 Unit	973,478,400			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02.36	Sub kegiatan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	2 laporan	2 laporan	24,000,000	2 laporan	26,400,000	2 laporan	28,000,000	6 Laporan	78,400,000			
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.38	Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah public safety center (psc 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	3 unit	3 unit	1,830,000,000	3 unit	2,000,000,000	3 unit	2,100,000,000	9 Unit	5,930,000,000			
	Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.02.02.2.02.40	Sub kegiatan Pengelolaan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang yang menderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	591 org	600 org	60,000,000	650 org	66,000,000	700 org	69,600,000	3150 Org	195,600,000			
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV/ Aids (ODHA)	1.02.02.2.02.41	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Penderita HIV/Aids yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76 org	78 org	50,000,000	80 org	55,000,000	82 org	60,500,000	174 Org	165,500,000			
	Terselenggaranya pengelolaan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.42	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1550	1575	20,000,000	1600	22,000,000	1625	24,200,000	4800	66,200,000			
Sasaran Kegiatan 1.3	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Faskes yang menjalankan sistem informasi	100%	100%	783,000,000	100%	861,300,000	100%	902,950,000	100%	2,547,250,000			Jumlah Puskesmas yang menjalankan sistem informasi manajemen puskesmas dibagi jumlah puskesmas dikali 100%
	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	29 Dokumen	35 Dokumen	783,000,000	36 Dokumen	861,300,000	37 Dokumen	902,950,000	108 Dokumen	2,547,250,000			
Sasaran Kegiatan 1.4	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	88.6	88,60	248,800,000	88,65	273,680,000	88,70	273,680,000	88,70	796,160,000			Hasil dari survey IKM
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	1.02.02.2.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	No	19 Unit	168,800,000	19 Unit	185,680,000	19 Unit	185,680,000	19 Unit	540,160,000			
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.04	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	88,000,000	1 Dokumen	88,000,000	3 Dokumen	256,000,000			
Sasaran Program 2	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDMk sesuai standar	0%	0.68%	545,880,000	0.70%	600,468,000	0.75%	660,514,800	0.75%	1,806,862,800	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Jumlah SDMk yang mengikuti pelatihan sesuai standar dibagi seluruh SDMk dikali 100%
Sasaran Kegiatan 2.1	Terlaksananya pemberian izin peraktek tenaga Kesehatan	1.02.03.01	Kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Persentase Tenaga Kesehatan yg memiliki SIP	90.82%	95%	101,500,000	95%	111,650,000	95%	122,815,000	95%	335,965,000			Jumlah Nakes yang memiliki SIP dibagi Jumlah Seluruh Nakes dikali 100%
				Cakupan Tenaga Kesehatan yang memiliki STR	96.05%	92,5%		93%		100%		100%	-			Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dibagi Jumlah Seluruh Tenaga Kesehatan dikali 100%
	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.01	Sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	101,500,000	1 Dokumen	111,650,000	1 Dokumen	122,815,000	3%	335,965,000			
Sasaran Kegiatan 2.2	Terencananya kebutuhan dan pendayagunaan SDM	1.02.03.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes dengan jenis tenaga sesuai standar	100%	100%	228,190,000	100%	251,009,000	100%	276,109,900	100%	755,308,900			Jumlah faskes yang memiliki minimal 9 jenis nakes sesuai deng PMK 43 tahun 2017 dibagi Jumlah faskes dikali 100%
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sumber daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.03	Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	228,190,000	1 Dokumen	251,009,000	1 Dokumen	276,109,900	3%	755,308,900			
Sasaran Kegiatan 2.3	Meningkatnya pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM	1.02.03.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	92%	3.9%	216,190,000	4.3	237,809,000	4.8%	261,589,900	4.8%	715,588,900			Jumlah Tenaga Kesehatan yang terlatih di bagi Jumlah Nakes X 100%
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber daya manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	0	35 orang	216,190,000	38 orang	237,809,000	42 orang	261,589,900	115 Orng	715,588,900			
Sasaran Program 3	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Obat dan makanan minuman	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minuman	Persentase pengawasan toko obat, apotek, dan keamanan pangan yang beredar sesuai standar	88%	89%	353,081,000	90%	388,389,100	91%	427,228,010	91%	1,168,698,110	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Jumlah keamanan pangan yang di awasi di bagi jumlah sarana tempat keamanan pangan di kali 100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran Kegiatan 3.1	Terselenggaranya Pemberian izin Sarana kesehatan	1.02.04.2.01	Kegiatan pemberian izin apotik, toko obat, alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Cakupan pengawasan sarana kefarmasian	0%	50%	79,310,000	60%	87,241,000	80%	95,965,100	100%	262,516,100			Jumlah pengawasan toko obat dan apotik di bagi jumlah toko obat dan apotik di kali 100
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.01	Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan, toko obat, toko kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan apotek, toko obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	18,150,000	3	49,650,000			
	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional	1.02.04.2.01.02	Sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	Jumlah apotek, Toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Na	55 Sarana	64,310,000	55 Sarana	70,741,000	55 Sarana	77,815,100	165	212,866,100			
	Terselenggaranya rekomendasi penerbitan sertifikat Produk PIRT	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikasi produksi pangan industri RT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri RT	Cakupan Industri yang memiliki Sertifikat PIRT	Na	41%	114,120,000	45%	125,532,000	49%	138,085,200	49%	377,737,200			Jumlah industri yang memiliki sertifikat PIRT dibagi Jumlah Industri dikali 100%
	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat produksi pangan industri RT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	1 Dokumen	1 Dokumen	114,120,000	1 Dokumen	125,532,000	1 Dokumen	138,085,200	3 Dokumen	377,737,200			
Sasaran Kegiatan 3.2	Meningkatnya keamanan produk pangan industri rumah tangga	1.02.04.2.06	Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Cakupan pengawasan sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	Na	75%	159,651,000	77%	175,616,100	80%	193,177,710	80%	528,444,810			Jumlah Pengawasan sarana IRTP dibagi Jumlah sarana IRTP dikali 100%
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman IRT beredar yang dilakukan pemeriksaan Pos Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Na	80 Unit	159,651,000	90 Unit	175,616,100	100 Unit	193,177,710	270 Unit	528,444,810			
Sasaran Program 4	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks rumah tangga yang berPHBS	0.69	0,70	245,000,000	0,73	269,500,000	0,75	296,450,000	0,75	810,950,000	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Rumah Tangga yang melaksanakan 8-10 indikator PHBS/Rumah Tangga yang disurvei
Sasaran Kegiatan 4.1	Meningkatnya pemberdayaan & peningkatan peran serta masyarakat	1.02.05.2.01	Kegiatan advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah	Persentase Advokasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Na	100%	155,000,000	100%	170,500,000	100%	187,550,000	100%	513,050,000			Jumlah kegiatan advokasi, kemitraan pemberdayaan masyarakat di bagi jumlah rencana kegiatan kali 100
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.01	Sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	155,000,000	1 dokumen	170,500,000	1 dokumen	187,550,000	3 Dokumen	513,050,000			
Sasaran Kegiatan 4.2	Meningkatnya pengembangan & Pelaksanaan UKBM	1.02.05.2.03	Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	96.62%	97%	90,000,000	97.5%	99,000,000	98%	108,900,000	98%	297,900,000			(Persentase UKBM (Posyandu, Pos UKK, Posbindu) yang sesuai standar dibagi UKBM yang ada) x 100
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.01	Sub kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	99,000,000	1 dokumen	108,900,000	3 Dokumen	297,900,000			
Meningkatnya reformasi birokrasi peranakat daerah				Nilai PMPRB PD	29.16	29.5		29.75		30		30				
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI DINIKES			Hasil Evaluasi AKIP Dinkes	79,54	80,00		80,05		80,10		80,10				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran Pogram 1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1.02.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.25	27.00	397,524,000	27.10	429,085,000	27.15	464,004,040	27.15	1,290,613,040	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Hasil penilaian komponen aspek perencanaan dalam evaluasi AKIP Daerah oleh Inspektorat
Sasaran Program 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10.80	11.00	187,480,000	11.10	206,228,000	11.15	226,850,800	11.15	620,558,800	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Hasil penilaian komponen aspek pelaporan dalam evaluasi AKIP Daerah oleh Inspektorat
Sasaran Program 3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan PD dalam LHP BPK-RI	0%	0%	143,498,000,000	0%	153,847,800,000	0%	159,217,378,236	0%	456,563,178,236	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK dalam LHP BPK-RI x 100%
Sasaran Program 4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	61.08	64%	270,750,000	64%	297,825,000	64%	327,607,500	64%	896,182,500	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Hasil Penguruan IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDMD
Sasaran Program 5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Na	3	1,330,095,000	3	1,463,104,500	3	1,609,414,950	3	4,402,614,450	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Nilai persepsi berdasarkan Hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Sekretariat Perangkat Daerah (dari 1 sampai 4)
Sasaran Program 5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	97.97%	98%	6,774,750,000	98.10%	7,252,225,000	98.20%	7,597,447,500	98.20%	21,624,422,500	Dinas Kesehatan	Kab.Bangka	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah dlm inventaris Perangkat Daerah x 100%
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	1.02.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	100%	397,524,000	100%	429,085,000	100%	464,004,040	100%	1,290,613,040			Jumlah tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penyusunan perencanaan dikali 100
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai Standar	100%	100%	187,480,000	100%	206,228,000	100%	226,850,800	100%	620,558,800			Jumlah tahapan penyusunan pelaporan yang dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penyusunan pelaporan dikali 100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	31 Dokumen	31 Dokumen	397,524,000	31 Dokumen	429,085,000	31 Dokumen	464,004,040	93 Dokumen	1,290,613,040			
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 Dokumen	16 Dokumen	187,480,000	16 Dokumen	206,228,000	16 Dokumen	226,850,800	48 Dokumen	620,558,800			
Sasaran Kegiatan 2.1	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	80,318,000,000	100%	88,349,800,000	100%	92,184,780,000	100%	260,852,580,000			Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh Perangkat Daerah x 100%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	665 org	665 org	80,000,000,000	665 org	88,000,000,000	665 org	91,800,000,000	1995 Org	259,800,000,000			
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	270,000,000	12 Dokumen	297,000,000	12 Dokumen	326,700,000	36 Dokumen	893,700,000			
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	28 Dokumen	28 Dokumen	48,000,000	28 Dokumen	52,800,000	28 Dokumen	58,080,000	84 Dokumen	158,880,000			
Sasaran Kegiatan 2.2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Opini Kinerja BLUD	WTP	WTP	63,180,000,000	WTP	65,498,000,000	WTP	67,032,598,236	WTP	195,710,598,236			Hasil opini kinerja BLUD
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.01	Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah blud yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	15 Unit kerja	15 Unit kerja	63,180,000,000	15 Unit kerja	65,498,000,000	15 Unit kerja	67,032,598,236	45 Unit Kerja	195,710,598,236			
Sasaran 3.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan atribut pegawai	1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100%	100%	9,750,000	100%	10,725,000	100%	11,797,500	100%	32,272,500			Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian			Persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian	100%	100%	1,000,000	100%	1,100,000	100%	1,210,000	100%	3,310,000			Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%
	Meningkatnya Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	44%	44%	260,000,000	45%	286,000,000	50%	314,600,000	50%	860,600,000			Jumlah pegawai yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.02.01.2.05.02	Subkegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	9,750,000	1 paket	10,725,000	1 paket	11,797,500	3 Paket	32,272,500			
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	1,000,000	14 Dokumen	1,100,000	14 Dokumen	1,210,000	42 Dokumen	3,310,000			
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.02.01.2.05.09	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 org	3 org	260,000,000	4 org	286,000,000	5 org	314,600,000	12 Org	860,600,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Sasaran 4.1</b>	<b>Terlaksananya Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>508,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>559,020,000</b>	<b>100%</b>	<b>614,922,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,682,142,000</b>			<b>Jumlah Layanan administrasi umum yang dilakukan dibagi jumlah layanan administrasi dikali 100%</b>
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.09	Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumla laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	55,200,000	12 Laporan	60,720,000	12 Laporan	66,792,000	36 Laporan	182,712,000			
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	175,000,000	12 Dokumen	192,500,000	12 Dokumen	211,750,000	36 Laporan	579,250,000			
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.02.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	278,000,000	12 Dokumen	305,800,000	12 Dokumen	336,380,000	36 Laporan	920,180,000			
<b>Sasaran 4.2</b>	<b>Terlaksananya layanan jasa penunjang perangkat daerah</b>	<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>821,895,000</b>	<b>100%</b>	<b>904,084,500</b>	<b>100%</b>	<b>994,492,950</b>	<b>100%</b>	<b>2,720,472,450</b>			<b>Jumlah layanan jasa penunjang yang dipenuhi dibagi jumlah layanan jasa penunjang dikali 100%</b>
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	550,000	12 Laporan	605,000	12 Laporan	665,500	36 Laporan	1,820,500			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.02.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	315,345,000	12 Laporan	346,879,500	12 Laporan	381,567,450	36 Laporan	1,043,791,950			
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.02.01.2.08.04	Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	506,000,000	12 Laporan	556,600,000	12 Laporan	612,260,000	36 Laporan	1,674,860,000			
<b>Sasaran 5.1</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan sarana &amp; prasarana pendukung kinerja</b>	<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penambahan aset perangkat daerah</b>	<b>5.65%</b>	<b>6%</b>	<b>699,000,000</b>	<b>7%</b>	<b>768,900,000</b>	<b>7%</b>	<b>845,790,000</b>	<b>7%</b>	<b>2,313,690,000</b>			<b>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah yang ada pada inventaris perangkat daerah x 100%</b>
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.02.01.2.07.06	Subkegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	512,000,000	10 unit	563,200,000	10 unit	619,520,000	30 Unit	1,694,720,000			
	Tersedianya Mebel	1.02.01.2.07.05	Subkegiatan Pengadaan Mebel (termasuk DID)	Jumlah paket Mebel yang disediakan	15 unit	15 unit	43,000,000	15 unit	47,300,000	15 unit	52,030,000	45 Unit	142,330,000			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.02.01.2.07.11	Subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	144,000,000	1 unit	158,400,000	1 unit	174,240,000	3 Unit	476,640,000			
<b>Sasaran 5.2</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</b>	<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>0.22%</b>	<b>5%</b>	<b>6,075,750,000</b>	<b>5%</b>	<b>6,483,325,000</b>	<b>5%</b>	<b>6,751,657,500</b>	<b>5%</b>	<b>19,310,732,500</b>			<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%</b>
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.02.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Opeasional/ Lapangan.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	11 Unit	382,000,000	11 Unit	420,200,000	11 Unit	462,220,000	33 Unit	1,264,420,000			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.02.01.2.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69 unit	69 Unit	50,000,000	69 Unit	55,000,000	69 Unit	60,500,000	207 Unit	165,500,000			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.02.01.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1 Unit	5,643,750,000	1 Unit	6,008,125,000	1 Unit	6,228,937,500	3 Unit	17,880,812,500			
							<b>263,657,270,000</b>		<b>280,929,683,000</b>		<b>292,112,285,900</b>		<b>836,699,238,900</b>			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka selama 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut. Indikator kinerja dimaksud menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.

#### 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
		Tahun 0 (2022)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Angka Kematian					
	AKI/100.000 KH	57,30	100	99,50	99,00	99,00
	AKB/1.000 KH	8,40	5,00	4,75	4,50	4,50
2	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,022	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Angka Kesakitan	15,34	13,20	13,15	13,10	13,10
4	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan		80,00	80,05	80,10	80,10

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sebagaimana tertera pada tabel 7.1 dioperasionalkan pencapaiannya oleh bidang-bidang yang terdapat dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan dan diukur melalui indikator kinerja program. Definisi operasional dan perhitungan pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka diformulasikan sebagai berikut :

Tabel 7.2  
 DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA  
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	<b>Angka Kematian</b> Angka Kematian Ibu     Angka Kematian Bayi	$K = \frac{\Sigma \text{ kematian ibu hamil, bersalin dan nifas selama 1 tahun}}{\Sigma \text{ Jumlah lahir hidup selama 1 tahun}} \times 100.000KH$  $K = \frac{\Sigma \text{ Jumlah kematian bayi selama 1 tahun}}{\Sigma \text{ Jumlah lahir hidup selama 1 tahun}} \times 1.000 KH$
		Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk	$K = \frac{\Sigma \text{ Jumlah Kasus Gizi buruk balita berdasarkan BB/TB di suatu wilayah pada periode tertentu}}{\Sigma \text{ jumlah seluruh balita pada periode tertentu di suatu wilayah}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN
		Angka Kesakitan	$K = \frac{\sum \text{Pnddk yg mengalami keluhan kesehatan \& terganggunya aktivitas}}{\sum \text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	Nilai AKIP dari Inspektorat

## 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.3

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome bagi PD pemangku urusan Pemerintah Daerah

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
1.	<b>Kesehatan</b>							
1.1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$
1.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten / kota yang terakreditasi	%	71,43	85,71	85,71	100	100	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$
1.3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	87,69	90	92	95	98	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$
1.4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	97,23	98	98,5	99	100	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$
1.5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$
1.6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,15	95	96	97	98	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$
1.7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Rumus
1.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71,32	71,50	72,50	73	73,50	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$
1.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,09	96	96,5	97	97,5	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$
1.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,47	72	72,25	72,50	73	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$
1.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100\%$
1.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100\%$
1.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100\%$
1.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100\%$

**Tabel 7.4**

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output bagi PD pemangku urusan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7	7	7	7	7	Aplikasi SIRS	
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	5	5	5	6	6	Bidang Pelayanan Kesehatan	
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu hamil yang tersedia	1,094,318	1,105,261	1,116,314	1,127,477	1,138,752	Bidang Kesehatan Masyarakat	
4	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayananN antenatal	474	474	474	474	474	Aplikasi SISDMK	
5	Jumlah dukungan logistik kesehatan Persalinan yang tersedia	15,732	15,889	16,048	16,209	16,371	Bidang Kesehatan Masyarakat	
6	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715	Aplikasi SISDMK	
7	Jumlah dukungan logistik kesehatan neonatal yang tersedia	22,047	22,267	22,490	22,715	22,942	Bidang Kesehatan Masyarakat	
8	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	485	485	485	485	485	Aplikasi SISDMK	
9	Jumlah dukungan logistik kesehatan balita yang tersedia	135,666	137,022	138,393	139,777	141,174	Bidang Kesehatan Masyarakat	
10	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	536	536	536	536	536	Aplikasi SISDMK	
11	Jumlah dukungan logistik kesehatan Usia Pendidikan Dasar yang tersedia	17,244	17,416	17,591	17,767	17,944	Bidang Kesehatan Masyarakat	
12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	Aplikasi SISDMK	
13	Jumlah dukungan logistik kesehatan Skrining usia produktif yang tersedia	12,512	12,637	12,763	12,891	13,020	Bidang P2PL	

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Sumber Data	Keterangan
14	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan Skrining usia produktif sesuai standar	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	Aplikasi SISDMK	
15	Jumlah dukungan logistik kesehatan skrining usia lanjut yang tersedia	46,482	46,947	47,416	47,890	48,369	Bidang Kesehatan Masyarakat	
16	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan skrining usia lanjut sesuai standar	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	Aplikasi SISDMK	
17	Jumlah dukungan logistik kesehatan hipertensi yang tersedia	76	77	78	78	79	Bidang P2PL	
18	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	1431	1431	1431	1431	1431	Aplikasi SISDMK	
19	Jumlah dukungan logistik kesehatan DM yang tersedia	336	339	343	346	350	Bidang P2PL	
20	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan DM sesuai standar	1,431	1,431	1,431	1,431	1,431	Aplikasi SISDMK	
21	Jumlah dukungan logistik kesehatan ODGJ yang tersedia	162	164	165	167	169	Bidang P2PL	
22	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan ODGJ sesuai standar	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	Aplikasi SISDMK	
23	Jumlah dukungan logistik kesehatan TBC yang tersedia	14,199	14,341	14,484	14,629	14,776	Bidang P2PL	
24	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	279	279	279	279	279	Aplikasi SISDMK	
25	Jumlah dukungan logistik kesehatan HIV yang tersedia	18,510	18,695	18,882	19,071	19,262	Bidang P2PL	
26	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan HIV sesuai standar	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	Aplikasi SISDMK	

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan merupakan kerangka acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka.

Rencana strategis Transisi Dinas Kesehatan disusun sebagai rancangan kegiatan 3 (tiga) tahunan pada Dinas Kesehatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka setiap tahun selama kurun waktu 3 tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun kedepan.

Sungailiat, April 2023

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka,



dr. Then Suyanti, MM

NIP. 19770919 200501 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat  
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92102 Faks.: (0717) 9210  
Email : [dinkes\\_bangka85@yahoo.com](mailto:dinkes_bangka85@yahoo.com) Website: [www.dinkes.bangka.go.id](http://www.dinkes.bangka.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.45/ 1539 /SK/KES/2022**  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024–2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang:**
- Bahwa dalam rangka menjamin upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka dan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2024-2026, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
  - Bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan;
  - Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2024-2026.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 TAHUN 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 8 seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 86);

#### MEMUTUSKAN:

##### Menetapkan:

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana strategis dinas Kesehatan kabupaten bangka tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
  2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
  3. Melakukan revisi/perbaikan rencana Strategis sesuai ketentuan;
  4. Melaporkan hasilnya kepada kepala perangkat daerah
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangka  
Pada tanggal : 6 Desember 2022  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKA**

  
*Then Suyanti*  
**THEN SUYANTI**

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangka

NOMOR : 188.45/ 1539 /SK/Kes/2022

TANGGAL : 6 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINKES KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas
3	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 4. Kepala Bidang P2PL 5. Sub Koordinator Perencanaan & Pelaporan 6. Staff Perencanaan dan Pelaporan

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : 6 Desember 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKA**



**JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024-2026**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KET</b>
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024- 2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	